

## DAFTAR PUSTAKA

- Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Buton ‘Laporan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
- Putri, Eko Normalita, dkk. (2016). *Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Syahbandar Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Belayar Kapal Perikanan*. Vol. 5 (No 1).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.36. (2012). Tentang Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan
- Politeknik Negeri Bengkalis, (2017). *Buku Panduan Tugas Akhir Politeknik Negeri Bengkalis*.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2014. Tentang *Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar*,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 69 Tahun 2001, *Tentang Pelabuhan*.
- Peraturan Undang – undang Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Nomor 01 Tahun 2010, Tentang *Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar*.
- Shonhaji.(2018) *penerbitan surat persetujuan belayar dalam upaya pemenuhan vol. 1 Adminitrative Law & Governance Journal 299-305*.
- Triadmojo. B. (2010). Tentang *Perencanaan Pelabuhan*. BETA OFFSET, Yogyakarta.
- Undang – Undang. Nomor 17 Tahun( 2008), *Tentang Pelayaran*.